

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyakit Virus Corona (COVID-19) dari tahun 2019-2021 telah menyebabkan penurunan emisi karbon atau peningkatan kualitas udara. Namun, sedikit yang diketahui tentang bagaimana pandemi telah memengaruhi transisi energi "rendah karbon" dan pada tahun 2022 perang Rusia ke Ukraina, yang meningkat menjadi konflik skala penuh tidak hanya mengakibatkan penderitaan kemanusiaan yang luar biasa, tetapi juga memicu gangguan ekonomi yang meluas dan berdampak jauh melampaui batas wilayah kedua Negara (Latifah, 2025). Invasi Rusia ke Ukraina dapat dianggap sebagai suatu titik krusial bagi semua negara di dunia untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan transisi energi yang berkelanjutan serta meminimalkan dampak dari tekanan geopolitik (www.kompas.id, 2023).

Di era pasca-pandemi global dan krisis iklim yang semakin mendesak, dunia usaha menghadapi tekanan ganda untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menjaga tanggung jawab lingkungan. Menurut laporan Bank Dunia (2023), emisi karbon global mencapai rekor tertinggi sebesar 37,4 miliar ton pada 2022, mendorong pemerintah dan lembaga keuangan internasional untuk mengadopsi mekanisme pendanaan hijau sebagai instrumen utama transisi menuju ekonomi rendah karbon. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dari orientasi profit semata menuju integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola

(ESG) dalam strategi bisnis, sebagaimana ditegaskan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) PBB nomor 13 tentang aksi iklim.

Sebagai negara berkembang yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor sumber daya alam, Indonesia menghadapi tantangan lingkungan yang semakin nyata. Perubahan iklim (*climate change*) merupakan dampak negatif dari eksploitasi dan fenomena tersebut, yang kini menjadi perhatian serius di tingkat nasional. Merujuk pada data CNN Indonesia (2021), manifestasi perubahan iklim di Indonesia ditunjukkan oleh beberapa indikator ekstrem, seperti terjadinya gelombang panas, kenaikan suhu permukaan di Sumatra dan Kalimantan yang mencapai 4°C, serta penurunan curah hujan hingga 12%. Fenomena ini memicu berbagai bencana iklim, meliputi kekeringan dan banjir secara berkala, kenaikan permukaan air laut di wilayah pesisir, kemunculan siklon tropis, hingga penurunan produktivitas panen komoditas pangan pokok.

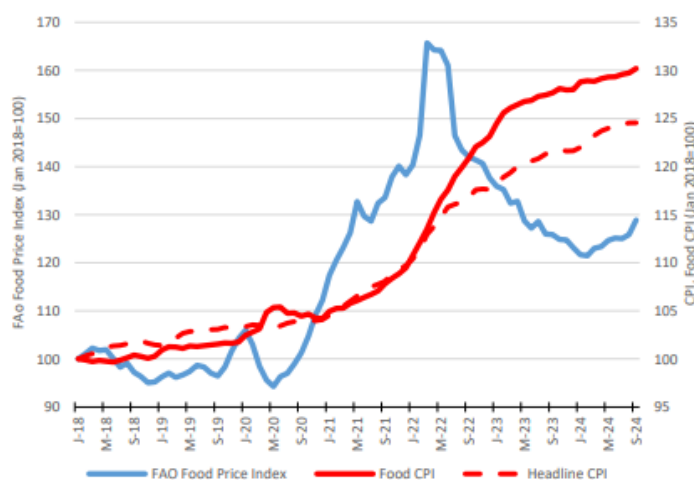


Gambar 1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) PDB Indonesia tumbuh dengan laju hanya 3,69% pada tahun 2021. Meskipun angka ini lebih baik daripada resesi tahun 2020, target pemerintah belum dapat dicapai sebagai upaya mendorong

pemulihan ekonomi (BPS, 2022). Tahun 2023 menandai peningkatan yang lebih menonjol dalam kondisi ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencatat pertumbuhan moderat sebesar 5,05% pada tahun 2023 (sumber: Badan Pusat Statistik/BPS, 2024), namun masih di bawah potensi optimal akibat tekanan inflasi dan ketidakpastian geopolitik. Data BPS menunjukkan PDB riil Indonesia mencapai Rp 20.892,4 triliun pada 2023, dengan kontribusi sektor keuangan mencapai sekitar 3-4% dari total PDB. Kondisi ini menekankan pentingnya sektor perbankan sebagai pilar utama perekonomian, yang berperan dalam mendistribusikan kredit dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.



Gambar 1. 2 Indeks Harga Pangan Dunia (2020 – 2024)

Sumber: FAO

Berdasarkan Gambar 1.2 ketidakstabilan ekonomi diperparah oleh kenaikan indeks harga pangan dunia yang cenderung fluktuatif selama rentang 2021 - 2024, yang terutama disebabkan oleh dampak pandemi terhadap rantai pasokan dan krisis geopolitik di berbagai wilayah, seperti konflik antara Rusia dan Ukraina. Kebijakan moneter negara-negara di kawasan Eropa serta Amerika

Serikat dalam upaya mengendalikan inflasi berdampak secara tidak langsung di perekonomian Indonesia. IHP tahun-ke-tahun (y-on-y) pada Februari 2024 mencapai 5,98%, lebih tinggi dari inflasi umum sebesar 2,75%. Kenaikan ini dipicu oleh faktor cuaca ekstrem dan gangguan rantai pasok global, yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan stabilitas keuangan. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan aspek keberlanjutan sebagai bagian dari strategi bisnis (Saputra *et al.*, 2025). Sektor perbankan, sebagai penyalur kredit utama, rentan terhadap risiko ini karena peningkatan *Non-Performing Loan* (NPL) akibat penurunan kemampuan debitur membayar, sebagaimana dilaporkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan rasio NPL perbankan nasional mencapai 2,55% pada akhir 2023 (Statistik Perbankan Indonesia/OJK, Desember 2023). Salah satu elemen kunci yang mempengaruhi keputusan investasi adalah ketidakpastian kondisi ekonomi dan kondisi lingkungan (Chen *et al.*, 2024).

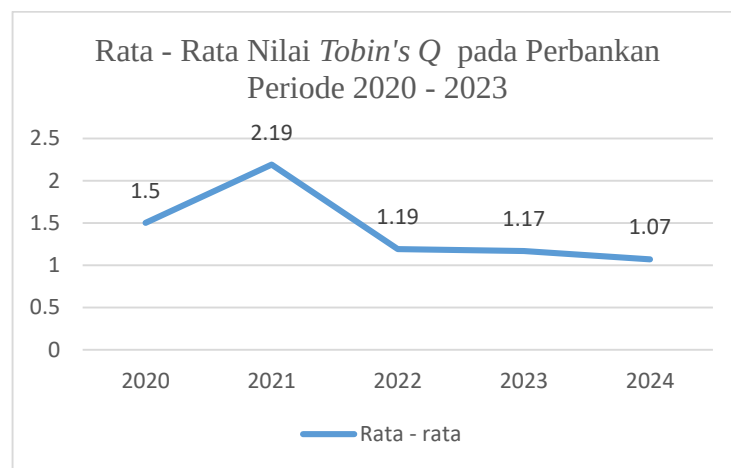
Di tengah kompetisi bisnis yang sangat ketat, peningkatan nilai perusahaan menjadi aspek penting untuk kelangsungan perusahaan. Nilai perusahaan berfungsi sebagai patokan bagi para investor dalam menilai kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya dengan efisien untuk mencapai keuntungan yang berkelanjutan (Yuniar & Artiara, 2022). Untuk mempertahankan peningkatan nilai perusahaan, perusahaan dituntut untuk tidak lagi hanya berfokus pada laba yang didapatkan. Perusahaan harus bisa mempertimbangkan aspek lain di luar aspek fisik dalam meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan (Adelina & Arza, 2021). Hal senada juga

disampaikan oleh Saputra *et. al.*, (2025) yang menyatakan menyampaikan bahwa nilai suatu perusahaan mencerminkan keadaan yang telah dicapainya, yang menunjukkan keyakinan masyarakat terhadap perusahaan tersebut sepanjang perjalanan dari saat didirikannya hingga sekarang.

Nilai perusahaan dapat diukur melalui beberapa metode yaitu dengan rumus *Price to Book Value* (PVB), *Price Earning Ratio* (PER), dan Tobin's Q (Nirwana, 2024) . Pada penelitian ini menggunakan Tobin's Q sebagai proksi pengukuran nilai perusahaan. Tobin's Q adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan nilai pasar perusahaan dengan nilai bukunya atau biaya penggantian aset yang dimiliki. Rasio ini digunakan untuk membantu menilai apakah pasar memberikan penilaian lebih tinggi atau lebih rendah terhadap perusahaan dibandingkan dengan nilai aset fisiknya (Lindawati, 2026). Jika nilai Tobin's Q suatu perusahaan lebih dari satu, hal ini mengindikasikan bahwa pasar menilai perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik sehingga membuka peluang investasi yang menguntungkan (Noviera *et.al.*, 2024).

Dalam sektor perbankan, nilai perusahaan menjadi sangat penting karena industri ini memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran penting dalam mendorong perkembangan ekonomi melalui aktivitas intermediasi keuangan, yang berarti mengumpulkan dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali ke sektor-sektor yang produktif (Baharudin, 2023). Fungsi ini membuat bank memiliki dampak langsung terhadap ketersediaan likuiditas, kestabilan keuangan, dan pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional (Rahman *et al.* , 2025). Dengan demikian, penilaian terhadap

nilai sebuah perusahaan dalam sektor ini menjadi sangat penting untuk memahami pandangan pasar terhadap seberapa efektif kinerja perusahaan akan datang. Untuk memberikan pemahaman secara keseluruhan mengenai situasi tersebut, berikut adalah rata-rata nilai Tobin's Q dari perusahaan-perusahaan di sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2020 – 2024.



Gambar 1. 3 Gambar Rata-rata Tobin's Perbankan Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data diolah

Berdasarkan gambar 1.3, tentang rata-rata nilai perusahaan yang diproksikan menggunakan Tobin's Q pada perusahaan subsektor perbankan dari periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi nilai Tobin's Q. Pada tahun 2020, rata-rata nilai Tobin's Q berada di angka 1,50, lalu meningkat tajam pada tahun 2021 hingga mencapai 2,19. Perubahan ini menunjukkan bahwa pada masa itu investor memandang prospek perusahaan perbankan dengan positif, sehingga nilai Tobin's Q ≥ 1 yang artinya menunjukkan kemungkinan pertumbuhan dan kepercayaan terhadap masa depan perusahaan. Namun, pada

tahun 2022 nilai Tobin's Q mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu sebesar 1,19, kemudian terus menurun hingga pada tahun 2023 menjadi 1,17, dan pada tahun 2024 menjadi 1,07. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa persepsi investor terhadap kinerja jangka panjang perbankan sedang melemah, yang dapat mencerminkan meningkatnya risiko investasi, persaingan yang semakin ketat, serta pengaruh kondisi ekonomi global dan kebijakan keuangan yang semakin ketat. Fenomena fluktuasi ini mengindikasikan bahwa nilai perusahaan perbankan di Indonesia belum stabil, padahal sektor ini memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan keuangan berkelanjutan.

Perbankan adalah sektor penting dalam dunia usaha dan ekonomi. Menurut UU No.10 Tahun 1998, perbankan adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan kepada orang atau pihak yang memerlukan. Retnoningrum (2025) mengungkapkan bahwa perbankan Indonesia memasuki babak baru. Adanya tantangan seperti perubahan iklim, siklus alam dan permasalahan lingkungan hidup dan sosial, telah mendorong bank untuk melakukan transformasi praktik bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) dengan menerapkan konsep ESG atau *Enviromental* (lingkungan), *Social* (sosial) and *Governance* (tata kelola).

Setiap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan memiliki target yang ingin diraih oleh pemilik dan manajemennya. Perusahaan memiliki tujuan utama untuk menaikkan kinerja keuangan mereka. Apa lagi saat ini dimana semakin peduli terhadap isu-isu lingkungan, investor semakin

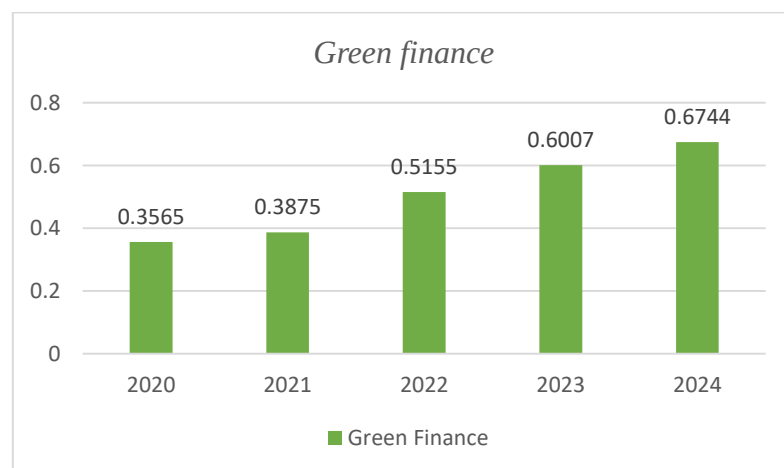
mempertimbangkan faktor lingkungan dalam mengambil keputusan investasi. Investor tidak lagi hanya fokus pada kinerja keuangan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam pengambilan keputusan investasi (Sana, 2023). Untuk meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan, perusahaan perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip *sustainability* ke dalam strategi bisnis dan operasionalnya. Strategi ini memperhitungkan dampak operasional perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, selain keuntungan finansial. Implementasi kebijakan *sustainability* seperti efisiensi energi, penggunaan sumber daya ramah lingkungan, dan keterbukaan terhadap isu lingkungan sosial menjadi nilai tambah bagi perusahaan di mata investor. Semakin tinggi komitmen perusahaan terhadap *sustainability*, semakin besar pula kepercayaan pasar yang berdampak positif terhadap peningkatan nilai perusahaan (Pranesti, 2022).

Dalam konteks ini, *green finance* merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan terhadap pembiayaan berkelanjutan dengan mengalokasikan dana pada proyek ramah lingkungan, seperti efisiensi energi, penurunan emisi, dan pengelolaan limbah (Li & Lin, 2024). Penelitian yang dilakukan Rosanti (2025) menjelaskan bahwa *green finance* merupakan upaya penyaluran dana atau investasi yang mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan, penanganan perubahan iklim, penggunaan energi terbarukan, serta pengelolaan yang bertanggung jawab di berbagai sektor. Jadi *green finance* mencakup semua investasi dalam barang dan jasa lingkungan dan investasi dalam kegiatan yang mengurangi kerusakan lingkungan dan iklim. Selain itu dalam kebijakan publik,

green finance melibatkan pembiayaan kebijakan publik yang mendorong implementasi proyek-proyek ataupun inisiatif perlindungan lingkungan atau proyek-proyek mitigasi kerusakan lingkungan (Humaira, 2022).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) sebagai upaya untuk mengakselerasi penerapan ESG bagi sektor jasa keuangan, serta Taksonomi Hijau Edisi 1.0. Roadmap ini berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan mendorong kerja sama lintas sektor. Tujuannya adalah menjadikan keuangan berkelanjutan sebagai "new normal" bagi sektor jasa keuangan, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim (Hatmadi & Trihadmini, 2021). Bank-bank di tanah air sedang berproses agar penyaluran kreditnya “menjadi hijau”. *Green finance* dapat berupa investasi atau kredit yang khusus diberikan untuk mendanai proyek pembangunan jangka panjang dan ramah lingkungan yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan (Mardhiah & Risman, 2026). Sebagai salah satu contoh praktik strategi *green finance* di sektor perbankan yaitu yang mana dilansir dari CNBC Indonesia, Purwanti (2024). Komitmen BRI dalam implementasi ESG tercermin dari portofolio pembiayaan berkelanjutan (*sustainable financing portfolio*) BRI pada akhir Desember 2023 yang mencapai Rp 777.3 triliun, atau setara 67,1% dari total kredit yang disalurkan serta investasi surat berharga korporasi berbasis ESG.

Pada tahun-tahun sebelumnya, penyaluran kredit berkelanjutan mayoritas tetap disalurkan kepada sektor UMKM dengan nilai sebesar Rp 690,4 triliun. Menurut Purwanti (2024) Pembiayaan kepada sektor hijau senilai Rp 82,3 triliun yang terdiri dari penyaluran kredit kepada sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berwawasan lingkungan senilai Rp 52,8 triliun, transportasi hijau sebesar Rp 11,2 triliun, energi terbarukan Rp 6 triliun, dan sektor Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) lainnya sebesar Rp 12,2 triliun. Penyaluran kredit berkelanjutan ini tercatat tumbuh double digit 11,2% secara tahunan (yoy). Selain dalam bentuk penyaluran kredit kepada sektor berkelanjutan, BRI juga melakukan investasi surat berharga berbasis ESG. Hingga akhir tahun 2023, BRI mencatat portofolio investasi surat berharga korporasi berbasis ESG sebesar Rp 4,54 triliun (Aprilia, 2025). Berikut ini merupakan data mengenai perkembangan implementasi *green finance* perbankan di BEI tahun 2021- 2024 :



Gambar 1. 4 Perkembangan *Green finance*

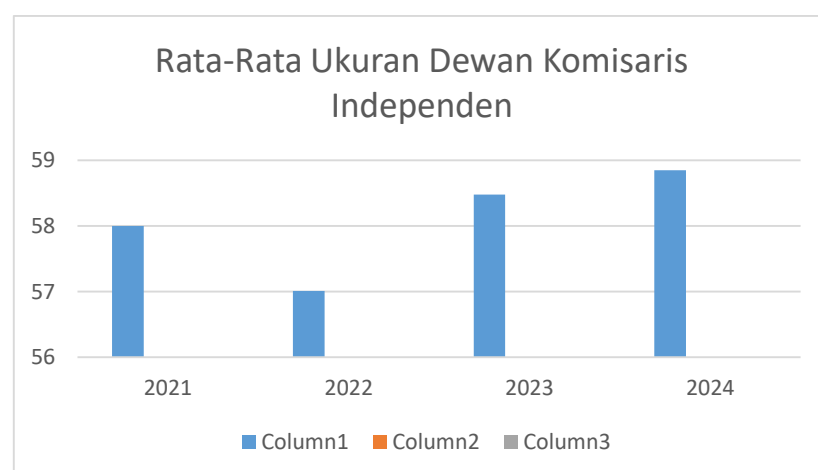
Sumber : OJK, Data diolah 2026

Pada era seperti sekarang kegiatan di seluruh dunia menjadi lebih mudah, serta berbagai sektor bidang mengalami kemajuan yang pesat. Dimana kemajuan bidang teknologi telah membuat pertukaran informasi dari seluruh dunia menjadi lebih cepat dan mudah yang menjadikan kegiatan di berbagai bidang menjadi lebih efektif dan efisien (Wahida *et al.*, 2023). Berbagai institusi keuangan telah mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan ruang lingkup usaha mereka. Salah satu tindakan yang diambil adalah dengan menjual saham kepada masyarakat umum, atau melakukan proses *go public*. Penting untuk dicatat bahwa lembaga perbankan pertama yang memberikan kesempatan kepemilikan kepada publik yang menjadikannya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah Bank Negara Indonesia (BNI) pada tahun 1996 (www.bni.co.id) setelah itu banyak disusul bank lain yang juga mulai melakukan *go public* di BEI setiap tahunnya, dimana pada tahun 2023 tercatat ada sebanyak 47 bank yang telah resmi *go public* di BEI (www.idx.co.id).

Banyaknya bank yang sudah mulai beroperasi di Indonesia dan masyarakat yang semakin selektif dalam memilih bank membuat persaingan di dunia perbankan semakin ketat, tingginya persaingan tersebut dapat meningkatkan risiko yang akan dihadapi oleh bank dalam menjaga kinerja keuangannya agar tetap dalam keadaan yang baik dan stabil (Honi *et al.*, 2020). Hal tersebut membuat Bank Indonesia selaku Bank Central Indonesia memperketat dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan nasional, dimana penilaian kesehatan bank sudah banyak mengalami perubahan. Pertama kali diberlakukan pada tahun 1999 menggunakan metode CAMEL, kemudian menjadi CAMELS lalu untuk

sekarang mengikuti Edaran Surat Bank Indonesia No. 13/24/DPNP Tahun 2011, Bank Indonesia memberlakukan metode RGEK sebagai penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia yang terdiri dari *Risk Profile* (profil risiko), *Good corporate governance* (GCG), *Earning* (rentabilitas), dan *Capital* (permodalan) (Safitri *et al.*, 2021).

Selain implementasi *green finance*, salah satu elemen dalam perusahaan yang mempengaruhi peningkatan nilai adalah *good corporate governance* (GCG). Di sektor perbankan, penerapan GCG menjadi sangat krusial karena industri ini didasarkan pada kepercayaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan setiap bank untuk mengadopsi prinsip-prinsip GCG untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas dan kewajaran dalam manajemen perusahaan. Dengan penerapan GCG yang baik, diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap perusahaan (Kristanto *et al.*, 2023).



Gambar 1. 5 Rata- Rata Ukuran Dewan Komisaris Independen

Sumber : Annual Report, data diolah 2026

Berdasarkan gambar 1.5 rata-rata ukuran dewan komisaris independen menunjukkan kecenderungan relative stabil dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar bank telah memenuhi ketentuan regulator dan berupaya mempertahankan mekanisme pengawasan perusahaan secara konsisten. Pada penelitian ini, *good corporate governance* diproksikan oleh ukuran dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen adalah pihak yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan manajemen, dewan komisaris lainnya, atau pemegang saham, dan juga tidak memiliki hubungan afiliasi bisnis yang dapat memengaruhi netralitasnya dalam menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan (Azhari & Kusumaningsih, 2025) . Dewan komisaris independen berperan utama sebagai pengawas yang objektif terhadap operasional perusahaan dan memastikan bahwa setiap keputusan manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Apabila peran dewan komisaris independen semakin efektif, maka peluang perusahaan untuk meminimalisir tindakan *oportunistik* dari manajemen, meningkatkan transparansi informasi, dan melindungi kepentingan para pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya akan semakin meningkat (Rajak *et al.*, 2026). Oleh karena itu, ukuran dewan komisaris independen sering dipakai sebagai indikator untuk menilai seberapa efektif *good corporate governance* diterapkan dalam perusahaan.

Meskipun demikian, jumlah dewan komisaris independen yang besar tidak selalu berdampak positif pada nilai perusahaan. Di beberapa bank, peningkatan jumlah komisaris independen belum tentu diikuti dengan peningkatan efektivitas

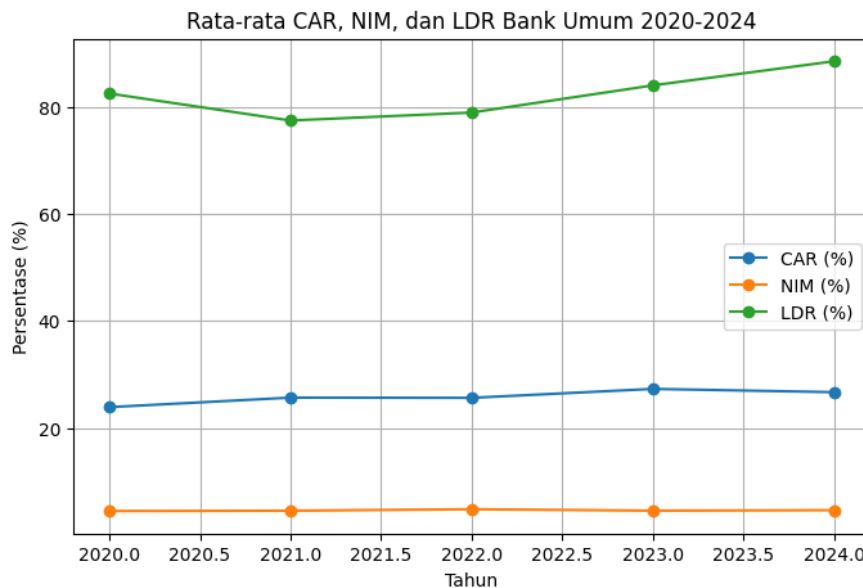
pengawasan. Terlalu banyak anggota dewan komisaris dapat menyebabkan koordinasi yang buruk, memperlambat pengambilan keputusan strategis, dan meningkatkan biaya pengawasan (Putri & Trisnaningsih, 2021). Sebaliknya, jumlah komisaris independen yang minim dapat mengurangi efektivitas fungsi pengawasan terhadap manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas *good corporate governance* bukan hanya ditentukan oleh jumlah anggota dewan komisaris independen, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas, kompetensi, independensi, dan kemampuan mereka dalam mengawasi.

Fenomena ini penting untuk diteliti di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2024. Selama waktu itu, sektor perbankan menghadapi berbagai tantangan seperti pemulihan ekonomi pascapandemi, suku bunga yang tinggi, inflasi yang meningkat, serta ketidakpastian ekonomi global yang mempengaruhi pandangan investor terhadap prospek perusahaan (Kristanto *et al.*, 2023). Dalam situasi seperti ini, investor tidak hanya melihat kinerja keuangan, tetapi juga menilai kualitas tata kelola perusahaan sebagai dasar untuk keputusan investasi. Dengan demikian, kehadiran dewan komisaris independen sebagai salah satu elemen dalam *Good corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, yang kemudian berdampak positif pada nilai perusahaan yang diukur menggunakan Tobin's Q.

Pada saat ini peranan bank yang sangat penting, maka penilaian kinerja bank sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kepercayaan dari calon nasabah (Desiko, 2020). Kinerja keuangan suatu bank mencerminkan situasi

keuangannya dalam jangka waktu tertentu termasuk pengumpulan dan penyaluran dana yang umumnya dinilai melalui ukuran seperti kecukupan modal, likuiditas, dan tingkat keuntungan bank (Sabrina *et al.*, 2023). Kinerja keuangan sendiri merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menilai suatu kualitas perusahaan dari faktor finansial dalam menghasilkan keuntungan dengan cara menganalisis suatu laporan keuangan (Harliani, 2024). Dan salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan perusahaan perbankan yaitu dengan melihat rentabilitas atau profitabilitasnya yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau keuntungan dalam suatu periode (Nirwana, 2024). Dimana kesuksesan suatu perusahaan bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Profitabilitas sendiri digunakan untuk menilai seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengelola sumber daya dengan efektif, karena itu profitabilitas menjadi indikator paling penting untuk menilai seberapa baik bank tersebut bekerja (Wijaya *et al.*, 2023).

Profitabilitas tidak hanya berfungsi untuk menilai sejauh mana perusahaan dapat memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mengevaluasi seberapa efektif perusahaan mengelola aset yang tersedia. Profitabilitas menilai seberapa baik manajemen perusahaan dapat untuk memperoleh keuntungan melalui berbagai aktivitas operasional dalam jangka waktu tertentu (Jannah & Sartika, 2022). Rasio yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat keuntungan atau rentabilitas. Pada tahun 2021 -2023 nilai rata- rata profitabilitas dari bank umum di BEI dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



**Gambar 1. 6 Rata – Rata CAR, NIM, dan LDR Bank Umum
2020 - 2024**

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2024

Berdasarkan gambar 1.5 menunjukkan rata-rata *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Net Interest Margin* (NIM), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) untuk bank umum antara tahun 2020 hingga 2024, yang diambil dari Statistik Perbankan Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan, terlihat bahwa kinerja perbankan Indonesia mengalami perubahan selama periode tersebut. Nilai CAR untuk bank umum umumnya berada pada angka yang tinggi dan stabil, dimulai dari 23,89% pada tahun 2020, meningkat menjadi 27,30% pada tahun 2023, lalu sedikit menurun menjadi 26,69% pada tahun 2024. Tingginya angka CAR ini mengindikasikan bahwa bank memiliki modal yang kokoh untuk mengatasi risiko serta memastikan stabilitas dalam sistem keuangan. Selain itu, rasio NIM juga mencerminkan profitabilitas yang cukup baik, dengan pergerakan dari 4,46% pada tahun 2020 menjadi 4,80% pada tahun 2022, meskipun pada tahun

2023 mengalami penurunan menjadi 4,53% dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 4,62%. Ini menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dari bunga bersih tetap stabil meskipun di tengah kondisi ekonomi yang berubah-ubah.

Di sisi lain, rasio LDR menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 77,49% pada tahun 2021 menjadi 88,57% pada tahun 2024. Kenaikan LDR ini menandakan bahwa bank semakin agresif dalam menyalurkan kredit dibandingkan dengan dana yang dihimpun dari pihak ketiga. Keadaan ini dapat menjadi tanda bahwa peran intermediasi bank semakin meningkat, tetapi di sisi lain juga berisiko terhadap masalah likuiditas jika tidak diimbangi dengan pengelolaan dana yang baik. Perubahan ketiga rasio tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan menghadapi tantangan dalam mempertahankan keseimbangan antara kecukupan modal, profitabilitas, dan likuiditas, terutama selama periode pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan ketidakpastian ekonomi global. Fenomena tersebut menjadi penting untuk diteliti karena rasio CAR, NIM, dan LDR merupakan indikator utama dalam menilai kesehatan dan kinerja perbankan. Perubahan pada rasio-rasio tersebut dapat memengaruhi kepercayaan investor serta nilai perusahaan perbankan (Liho *et al.*, 2025).

Profitabilitas yang tinggi membuat perusahaan lebih menarik bagi investor karena menunjukkan potensi keuntungan investasi yang maksimal (Kusumaningrum & Iswara 2021). Perusahaan yang menghasilkan laba besar umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik untuk membagikan dividen dan membiayai ekspansi bisnis menggunakan dana internal, tanpa terlalu bergantung

pada utang. Oleh karena itu, tingkat keuntungan yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan memperkuat citra perusahaan di mata pemegang saham dan investor potensial (Kurniawan *et al.*, 2025).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian dari Hardi *et al.*, (2026) Pemanfaatan *green finance* dapat meningkatkan nilai pemangku kepentingan dan nilai pemegang saham. Rahmanisa (2023) dalam penelitian Harliani (2024) menunjukkan bahwa *green finance* memiliki pengaruh pada nilai suatu perusahaan. Secara empiris, perusahaan yang menerapkan praktik bisnis berkelanjutan atau memiliki kepedulian dan kinerja lingkungan yang baik telah teruji dapat meningkatkan. Berbeda dengan pendapat Alfikri dan Susyani (2023) yang menyatakan bahwa *green finance* tidak mempunyai pengaruh positif terhadap meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu hal ini juga diperkuat oleh penelitian Bany (2023) yang menyatakan *green finance* tidak akan memberikan pengaruh pada nilai perusahaan karena konsep tersebut belum banyak diketahui para pemangku kepentingan.

Menurut penelitian (Awad *et al.*, 2024), selain menganalisis rasio-rasio keuangan, terdapat faktor lain yang dapat digunakan untuk meninjau Harga Saham yaitu Karakteristik Dewan yang merupakan bagian dari *Corporate Governance*. Mereka sering kali mencari saham dengan ciri dari *Good corporate governance* yang jelas dan kinerja yang kuat. *Indonesian Governance Forum* menjelaskan tata kelola perusahaan sebagai suatu sistem dalam mengatur dan mengawasi perusahaan, atau sebagai suatu kerangka kerja yang menjadi

pedoman dalam mengatur hubungan hak dan kewajiban di antara para pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditor, pemerintah, karyawan, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Terdapat kesamaan yang penting dalam hasil penelitian sejumlah akademisi yang telah mengkaji hubungan antara *good corporate governance* dan nilai perusahaan. Menurut penelitian sebelumnya yaitu Yabela *et al.*, (2026) menyatakan bahwa penerapan prinsip GCG yang baik karena mampu mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Jannah & Sartika (2022) dan Kasih *et al.*, (2022) menyatakan *good corporate governance* merupakan proses dan struktur yang diterapkan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan serta akuntabilitas perusahaan. Tujuannya adalah menciptakan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Berbeda dengan temuan Rahmawati & Mulyani (2026) yang menyatakan arah negative karena fluktuasi suku bunga serta ketidakpastian ekonomi global yang terjadi sepanjang tahun 2022 hingga 2024 mendorong para investor untuk mengambil sikap cenderung pasif. Fokus utama mereka beralih pada upaya penyeimbangan kembali (*rebalancing*) portofolio dan pemeliharaan likuiditas, ketimbang melakukan intervensi strategis terhadap kebijakan perusahaan.

Dengan menggunakan berbagai struktur kelembagaan atau prosedur pengawasan serta kerangka kerja tata kelola perusahaan yang kuat dapat mengurangi bahaya etika dan seleksi negatif, meminimalkan konflik otonomi,

melindungi kepentingan investor dan pemangku kepentingan, serta menurunkan bahaya penurunan harga saham (Talawa & Badwan, 2024). Kepentingan pemegang saham dan manajemen perusahaan harus diseimbangkan oleh dewan direksi. Komponen kunci keberhasilan adalah membangun hubungan yang kuat dengan CEO. Dimana, *Chief Officer Executive* (CEO) bertanggung jawab untuk memastikan bisnis beroperasi seefisien mungkin dan menghasilkan uang. Keputusan dan kapabilitas seorang CEO dapat memengaruhi persepsi investor terhadap prospek masa depan perusahaan, yang pada akhirnya tercermin dalam pergerakan harga saham (Custódio & Metzger, 2014) dalam (Magfirah, 2025)). Harga saham meningkat seiring dengan peningkatan kinerja perusahaan. Selain itu, CEO sering kali menerima saham di perusahaan yang mereka pimpin sebagai bagian dari paket remunerasi mereka yang dapat memperkaya CEO.

Beberapa peneliti meneliti profitabilitas sebagai variabel mediasi terhadap nilai perusahaan belum banyak yang meneliti tapi ada beberapa yang mengungkapkan hasilnya. Riset dari (Alfikri & Susyani, 2023) menunjukkan hasil yang negatif antar variabel. Purbaningsih (2024) Nilai perusahaan gambaran dari perusahaan itu sendiri tercermin pada nilai perusahaan dalam hal ini menjelaskan bagaimana perusahaan menjalankan kegiatan usahanya secara bertahap, kinerja pada perusahaan dapat dihitung menggunakan profitabilitas dipengaruhi oleh nilai perusahaan. Sejalan dengan penelitian dari Pardede, (2024). Kesimpulannya profitabilitas dipengaruhi oleh nilai bisnis. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa terdapat kesimpulan yang tidak konsisten pada variabel yang sama antara satu penelitian dengan penelitian

lainya. Yang pertama, inkonsistensi hasil temuan pengaruh terhadap nilai perusahaan. Kedua, terdapat hasil yang bertentangan mengenai *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengkaji hubungan antara *green finance* dan nilai perusahaan pada sektor perbankan di Indonesia, dengan memasukkan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Meskipun isu *green finance* semakin berkembang dan telah menjadi perhatian regulator melalui POJK 51 Tahun 2017 dan roadmap keuangan berkelanjutan 2021–2025, belum banyak penelitian empiris yang secara langsung menguji dampaknya terhadap nilai perusahaan, pada perusahaan perbankan. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memadukan aspek keuangan berkelanjutan dengan *good corporate governance* dan indikator profitabilitas, yang jarang diteliti secara bersamaan dalam satu model. Dengan periode penelitian mencakup 2021-2024, penelitian ini juga menangkap dinamika terkini, termasuk masa pasca pandemi dan percepatan implementasi keuangan hijau di Indonesia.

Penelitian ini penting dilakukan karena nilai perusahaan merupakan indikator utama yang menjadi perhatian investor dalam menilai prospek jangka panjang suatu perusahaan, terutama di sektor perbankan yang sangat bergantung pada kepercayaan publik. Dalam konteks global dan nasional yang mendorong integrasi aspek lingkungan dalam aktivitas bisnis, penerapan *green finance* menjadi hal yang krusial. Namun, sejauh mana penerapan *green finance* berdampak nyata terhadap peningkatan nilai perusahaan masih menjadi pertanyaan empiris yang belum terjawab dengan jelas, khususnya di Indonesia.

Selain itu, *good corporate governance* dan profitabilitas tetap menjadi indikator klasik yang diperhatikan pada pengelolaan keputusan keuangan. Maka dari itu, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan di tengah tuntutan keberlanjutan dan efisiensi keuangan.

Para peneliti didorong untuk melakukan studi tambahan mengenai dampak keuangan hijau dan *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan profitabilitas sebagai variabel mediasi, mengingat fenomena, *gap research*, dan *novelty* yang diidentifikasi dalam studi ini. Tujuan penggunaan faktor *green finance* dan *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas adalah untuk menghasilkan temuan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Maka dari itu, Peneliti melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh *Green Finance* dan *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel mediasi**”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dijelaskan, maka peneliti memberi batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dibatasi pada sektor keuangan sub-sektor perbankan yang tercatat di BEI yang mana memenuhi syarat telah melakukan *Green finance* dan yang telah mengeluarkan laporan keuangan

2. Variabel Penelitian ini akan dibatasi pada masalah *Green finance* (X1), *Good corporate governance* (X2), Nilai Perusahaan (Y) dan Profitabilitas (Z) sebagai variabel mediasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Green finance* terhadap Nilai perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024 ?
2. Bagaimana pengaruh *Good corporate governance* terhadap Nilai perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024 ?
3. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024?
4. Bagaimana Profitabilitas dapat memediasi pengaruh *Green finance* terhadap Nilai perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024 ?
5. Bagaimana Profitabilitas dapat memediasi pengaruh *Good corporate governance* terhadap Nilai perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024 ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa *Green finance* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024.
2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa *Good corporate governance* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024.
3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024.
4. Untuk memberikan bukti empiris bahwa Profitabilitas mampu memediasi pengaruh *Green finance* terhadap Nilai Perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024.
5. Untuk memberikan bukti empiris bahwa Profitabilitass mampu memediasi pengaruh *Good corporate governance* terhadap Nilai Perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian menerapkan teori stakeholder yang digunakan untuk menjelaskan keterhubungan antara manajer dan pemilik, dimana terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi kondisi finansial

perusahaan, termasuk naiknya nilai perusahaan dimata investor. Dalam hal ini peran *good corporate governance* seperti keberadaan komisaris independen serta tingkat nim sangat penting untuk pengawasan yang dapat meminimalisir konflik tersebut.

Teori stakeholder juga menjelaskan bahwa perusahaan yang mampu memenuhi harapan para stakeholder melalui penerapan *green finance* dan *good corporate governance* yang baik akan memperoleh legitimasi dan dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak. Dukungan tersebut dapat tercermin dalam meningkatnya kepercayaan investor dan kreditor terhadap prospek perusahaan. Kinerja keuangan yang baik, yang tercermin melalui tingkat profitabilitas yang tinggi, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai ekonomi bagi para stakeholder. Kondisi ini dapat meningkatkan persepsi positif pasar terhadap perusahaan sehingga mendorong minat investasi dan berimplikasi pada peningkatan nilai perusahaan.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Perusahaan

Untuk memberikan penjelasan dan beberapa bahan referensi dalam menghadapi masalah yang sama, serta sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan tentang fenomena yang mungkin terjadi di masa depan, sehingga perusahaan dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk mengatasinya.

B. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi pembelajaran dan pengetahuan khususnya bagi Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun.

C. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan dalam menambah wawasan serta ilmu di masa depan, terutama yang membahas subjek yang sama dapat disiapkan dengan menggunakan temuan penelitian ini sebagai referensi.